

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**MEDAN-INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Melisa Septriani Sitobang  
NPM : 18510292  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Rumah Sakit Advent Medan Provinsi Sumatera Utara

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah di lengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Studi Strata Satu (S1)**

**Program Studi Akuntansi**

**Pembimbing Utama**



(Hendrik E. S. Samsir, S.E., Ak., M.Ak. CA)

**Dekan**



(Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si)

**Pembimbing Pendamping**



(Meilinda Stefani Harefa, SE., M.Si)

**Ketua Program Studi**



(Dr. E. Manatup Berliana Lumbangtol, SE., M.Si, AK, CA)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara peripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan unit gawat darurat. Rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, untuk menjalankan tugasnya, rumah sakit juga berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sakit memegang peranan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semua masyarakat pasti menginginkan pelayanan yang optimal untuk mengobati dan mencegah komplikasi penyakitnya. Saat ini rumah sakit telah meningkatkan performa usahanya agar bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Dari waktu ke waktu perkembangan industri semakin kompetitif, mengakibatkan setiap perusahaan harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Termasuk rumah sakit yang saat ini telah terjadi pergeseran dalam hal pembayaran, dahulu pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dibiayai oleh diri sendiri saat ini pembayaran bisa melalui pihak ketiga. Hal ini tentunya membuat rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan harus mengikuti pergeseran ini agar bisa bersaing dengan rumah sakit lain dengan kemudahan pembayaran layanan. Rumah sakit tidak hanya menerima

pembayaran tunai namun juga pembayaran kredit untuk pelayanannya (Wibowo, 2010).

Dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan asuransi, selain itu terdapat perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan pihak Rumah sakit untuk menjamin kesehatan para pekerja dan keluarganya. Pembayaran secara kredit terjadi ketika pasien tidak membayar secara tunai atas jasa pelayanan yang diterimanya, hal ini menyebabkan rumah sakit tidak menerima uang kas secara langsung. Pasien tersebut menggunakan jasa asuransi atau jaminan kesehatan sehingga terdapat tenggat waktu atau tempo rumah sakit akan menerima pembayaran atau uang kas langsung atas pelayanan yang telah diberikan. Ketika pembayaran tersebut belum terjadi maka transaksi tersebut disebut piutang.

Piutang adalah transaksi yang terjadi akibat penjualan barang atau jasa oleh perusahaan. Piutang merupakan hak dari penjual atau penyedia jasa untuk menagih kepada konsumen atau pembeli dikarenakan adanya transaksi penjualan secara kredit (Solang, 2016). Piutang hendaknya dikelola secara efisien sebab piutang adalah bentuk investasi perusahaan yang cukup besar dan banyak memberikan manfaat bagi perusahaan. Selain itu perlu adanya manajemen piutang yang baik sehingga bisa memperoleh laba yang optimal. Keuntungan suatu perusahaan atau usaha dapat ditentukan dari besar kecilnya perputaran piutang. Oleh karena itu salah satu strategi suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan atau pendapatannya adalah dengan adanya kredit atau penjualan kredit. Kredit tidak langsung menghasilkan keuntungan atau kas akan tetapi menghasilkan piutang kepada konsumen atau disebut piutang

usaha, yang kemudian pada hari jatuh tempo terjadi aliran kas masuk (*cash in flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut.

Piutang pada rumah sakit terjadi karena adanya peran pihak ketiga yang menjamin pembayaran pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien. Sehingga pasien tidak membayar secara langsung pelayanan yang telah diperoleh. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah jaminan kesehatan oleh pemerintah (BPJS), asuransi swasta maupun jaminan kesehatan dari perusahaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pembayaran piutang adalah adanya piutang tidak tertagih, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan piutang dengan jumlah kas masuk dari pengembalian piutang, hal ini tentunya akan mempengaruhi aliran kas dan keuntungan yang diperoleh rumah sakit. Semakin besar selisih antara jumlah keseluruhan piutang dengan pengembalian piutang maka semakin besar juga jumlah piutang tak tertagih atau beban yang dialami oleh rumah sakit. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan rumah sakit terutama pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Oleh karena adanya permasalahan tersebut perlu adanya pengendalian piutang yang baik dan efisien.

Pimpinan pada rumahsakit tidak dapat mengerjakan semua pekerjaannya sendiri sehingga pimpinan tersebut melakukan pembagian tugas pada bawahannya, wewenang dan tanggung jawab yang dipimpin untuk membantu perusahaan tersebut dibutuhkan suatu pengendalian intern agar dapat mengontrol pekerjaan yang ada sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pencatatan yang sedang berlangsung dan keputusan tersebut harus diambil alih oleh pihak manajemen dalam pengelolaan atau sistem pengendalian internal.

Pengaplikasian pengendalian internal adalah suatu sistem yang berperan sangat penting sebab sering terjadi kecurangan dalam perusahaan. Hal-hal yang termasuk dalam sistem tersebut adalah kebijakan, prosedur, teknik, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan saling berinteraksi guna melindungi harta, menjamin terjadinya hutang tidak layak, menjamin ketelitian dan data akuntansi yang dapat dipercaya, diperoleh operasi secara efektif dan efisien serta menjamin kebijakan perusahaan ditaati oleh semua (Latif dan Solang, 2016). Terdapat beberapa bagian atau komponen dalam pengendalian internal antara lain adalah lingkungan pengendalian (control environment), Penilaian resiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi serta pemantauan (monitoring). Bagian-bagian ini sangat penting karena memiliki beberapa unsur dan sifat yang dapat meningkatkan kepercayaan pada data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva.

Salah satu sistem pengendalian internal adalah pengendalian piutang. Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur dan semua metode dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan harta milik perusahaan dalam pemeriksaan ketelitian, kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian internal juga di buat untuk memberikan keamanan terhadap asset-asset penting dan mencegah dari pemborosan, kecurangan dan ke tidak efisien penggunaan data dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan, oleh karena itu dalam undang-undang bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengendalian dan pengelolaan

keuangan yang lebih akuntabel dan transparan dalam mencapai pengendalian internal yang memadai.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, fenomena yang biasanya terjadi adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik baik dalam pemerintah, publik, dan daerah. Akuntabel (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) merupakan satu hal yang berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan pada rumah sakit. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada rumah sakit. Agar pengelolaan keuangan akuntabel yang membutuhkan keterbukaan (transparansi).

Menurut Muindro (2013) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan, dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, maka secara otomatis pula terdapat partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat di dalamnya, Akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas public lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal dan vertikal. Partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Struktur pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data dalam akuntansi, yang mendorong efisiensi agar dipatuhinya kebijakan manajemen. Mulyadi, (2018). Tujuan dari sistem pengendalian internal dapat juga dikelompokan menjadi dua bagian, pertama pengendalian internal akuntansi yang meliputi beberapa struktur organisasi, metode dan ukuran untuk menjaga kekayaan serta mengecek ketelitian data akuntansi, kedua pengendalian internal administratif yang meliputi struktur organisasi dimana metode dan ukurannya dikoordinasikan terutama untuk mencapai efisiensi dan kebijakan manajemen. Sistem yang dapat menggambarkan alur pengeluaran maupun penerimaan kas dan piutang adalah salah satu sistem yang dibutuhkan oleh satu instansi atau suatu badan usaha.

Salah satu rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan sistem pembayaran dengan pihak ketiga adalah Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara. Rumah sakit ini adalah salah satu rumah sakit swasta yang memiliki pelayanan cukup lengkap dan pelayanan yang baik. Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara telah bekerja sama dengan lebih dari 20 perusahaan rekanan dan jasa asuransi terkait dengan pemberian layanan pada pasien. Tidak hanya perusahaan jaminan kesehatan milik pemerintah namun juga swasta.

**Tabel 1.1 Daftar perusahaan jaminan kesehatan yang bekerjasama dengan RS Advent**

No	Perusahaan	No	Perusahaan
1	PT AA INTERNATIONAL	15	Lippo General
2	ABDA	16	Mandiri Inhealth MICC
3	AIA FINANCE	17	Manulife Financial

4	PT Ajinomoto	18	Megalife
5	ALLIANZ	19	MNC Life Assurance Admedika
6	Astra Life	20	Prudential
7	BRI Life Admedika	21	PT Kereta Api Indonesia
8	Central Asia Raya	22	PT PLN
9	Chubb	23	Reliance Admedika
10	Asuransi FWD	24	Sequis Life
11	Generali Admedika	25	Sinar Mas
12	Halodoc	26	Telkom Media
13	International pacific cross	27	Jasa raharja
14	Jamsostek		

Sumber: Bagian Keuangan RS Advent

Berdasarkan data dari Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir piutang pelayanan mengalami fluktuasi, yaitu

**Tabel 1.2 Nilai Piutang RS Advent**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Piutang (Rp)</b>
1 Januari 2022`	7.569.439.704
1 Maret 2022	15.891.314.784
1 Juni 2022	13.626.342.199
1 September 2022	13.602.392.850
1 Desember 2022	12.190.736.246

Sumber: Bagian Keuangan RS Advent

DJumlah piutang pada tabel diatas adalah jumlah piutang pihak ketiga baik Asuransi maupun BPJS. Piutang di RS Advent adalah piutang jangka pendek, tidak ada piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek RS Advent berumur 30-45 hari. Hal ini karena piutang di RS Advent berasal dari pelayanan kepada pasien, untuk pasien umum piutang jatuh tempo ketika pasien pulang, sedangkan untuk pasien asuransi biasanya 30-45 hari, untuk pasien BPJS jatuh tempo 30 hari kerja. Meskipun begitu pembayaran piutang dari pihak ketiga pada RS Advent jugamengalami keterlambatan setiap periodenya, meskipun



RS Advent Provinsi Sumatera Utara telah berusaha melakukan kebijakan agar pembayaran piutang berjalan lancar.

Masalah yang terjadi terkait piutang di Rumah Sakit Advent adalah, adanya piutang tak tertagih yang lebih dari 10 bulan yang menyebabkan piutang tersebut dihapuskan. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada perolehan laba. Permasalahan ini secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi operasional rumah sakit. Oleh karena itu pengendalian internal terhadap piutang perlu dilakukan dengan tepat guna menghindari terjadinya kerugian piutang.

Selain itu permasalahan yang terjadi adalah rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena kesehatan merupakan hak seluruh warga negara. Tetapi, masih ada warga negara yang tidak mampu belum terjangkau dalam jaminan kesehatan pemerintah, sehingga tidak dapat membayar biaya rumah sakit padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, rumah sakit harus tetap dapat membiayai operasionalnya sendiri agar tetap *going concern*. Sehingga dibutuhkan pengendalian internal piutang yang efisien dan efektif agar rumah sakit tetap dapat membiayai operasionalnya dan warga negara tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti akan meneliti tentang Analisis sistem pengendalian internal piutang Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara.
2. Apa masalah atau kendala yang dihadapi terkait pengendalian internal piutang Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara.
3. Apa solusi yang dilakukan terhadap pengendalian internal piutang Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahuisistem pengendalian internal pada Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi terkait pengendalian internal piutang Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahuisolusi yang dilakukan terhadap pengendalian internal piutang Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara?

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literaturtentang pengendalianinternal terhadap piutang khususnya piutang pada perusahaan jasa, ditujukan kepada para peneliti yang akan

melakukan penelitian mengenai pengendalian internal atas piutang dimasa mendatang

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan menambah pengetahuan peneliti bagaimana praktik dilapangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan kepada rumah sakit dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap piutang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengendalian Internal

##### 2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Teori organisasi dan akuntansi menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dirancang guna membuat organisasi tersebut mencapai tujuan objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan mekanisme pemeriksaan internal guna memastikan pencapaian tujuan organisasi (Hanum, 2016).

Hal-hal yang termasuk dalam sistem tersebut adalah kebijakan, prosedur, teknik, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan saling berinteraksi guna melindungi harta, menjamin terjadinya hutang tidak layak, menjamin ketelitian dan data akuntansi yang dapat dipercaya, diperoleh operasi secara efektif dan efisien serta menjamin kebijakan perusahaan ditaati oleh semua (Latif dan Solang, 2016).

*Statement On Auditing Procedures (SAP) No 3* dalam Latif dan Solang (2016) mengemukakan bahwa internal control adalah pengendalian internal yang terdiri dari rencana kerja organisasi atau perusahaan, seluruh metode dan ukuran yang dijadikan satu dan dijalankan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menggunakan asset-aset perusahaan, memeriksa ketepatan dan keterandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi serta meningkatkan kepatuhan kepada kebijaksanaan manajemen. Pengendalian internal atau control intern diartikan suatu proses yang dipengaruhi oleh sistem

teknologi informasi dan SDM yang disusun guna membantu organisasi mencapai tujuan atau objek tertentu.

Kegiatan pengendalian internal beragam, setiap perusahaan atau organisasi berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti besarnya perusahaan. Meskipun begitu sistem pengendalian internal yang pokok dapat diberlakukan kepada semua perusahaan, yaitu pertanggungjawaban secara nyata, pengangsuran kekayaan dan karyawan perusahaan, pelaksanaan pencatatan yang andal, pemisahan tanggung jawab atas transaksi, penyimpanan asset dan pencatatan, penggunaan peralatan mekanis serta pelaksanaan secara independen.

### **2.1.2 Tujuan pengendalian intern**

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2016) dilihat dari definisi sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek Ketelitian Dan Keandalan
3. Mendorong Efisiensi
4. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Dilihat dari tujuan sistem pengendalian internal, maka sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pengendalian internal akuntansi

Pengendalian akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para

investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

## 2. Pengendalian internal administrative

Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016).

### 2.1.3 Fungsi Pengendalian Intern

Romney (2013) menyebutkan bahwa pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengendalian preventif

Pengendalian preventif memiliki fungsi mencegah terjadinya masalah.

#### 2. Pengendalian dektektif

Pengendalian detektif memiliki fungsi untuk menemukan masalah yang tidak bisa dicegah.

#### 3. Pengendalian korektif

Pengendalian korektif mempunyai fungsi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan dari masalah tersebut.

### 2.1.4 Komponen pengendalian internal

*Komponen pokok dalam sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: (Mulyadi 2016)*

#### 1. *Struktur organisasi yang memisahkan anunjawa unsional secara tegas.*

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatankegiatan pokok perusahaan

2. ***Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, piutang, pendapatan dan biaya.***
3. ***Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.*** Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. ***Karyawan yang bermutu, sesuai dengan tanggungjawabnya.***

Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif

### **2.1.5 Keterbatasan pengendalian internal**

Pengendalian internal yang baik bukanlah struktur pengendalian yang ketat dan maksimal, pengendalian internal memiliki keterbatasan atau kelemahan antara lain adalah:

1. Kolusi atau persekongkolan

Pengendalian internal mengupayakan agar tidak terjadi kolusi atau persekongkolan di dalam perusahaan seperti dengan cara giliran bertugas, larangan melakukan tugas yang bertentangan kepada pegawai yang terdapat hubungan kekerabatan. Namun pengendalian internal ini tidak bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi persekongkolan atau kolusi dalam suatu perusahaan, karena hanya bersifat mencegah atau meminimalisir.

## 2. Perubahan

Struktur atau sistem pengendalian internal harus selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi.

## 3. Kelemahan manusia

Banyak masalah kebocoran pengendalian internal yang sebenarnya secara teoritis sudah baik. Namun karena kurang kompeten sumber daya manusia yang menjalankannya sehingga terjadi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu sumber daya manusia yang kompeten dan paham akan sistem pengendalian internal adalah salah satu unsur terpenting dalam pengendalian intern.

## 4. Azas biaya manfaat

Pengendalian internal juga harus memikirkan biaya yang dibutuhkan dan kegunaannya. Seperti misalnya adanya biaya untuk mengendalikan hal tertentu yang melebihi kegunaannya atau manfaat yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

### **2.1.6 Pengendalian internal atas piutang usaha**

Yang menjadi focus utama dalam pengendalian internal piutang adalah bagaimana pengamanan yang efektif dan efisien atas piutang usaha baik itu



segi keamanan kas, pemisahan tugas serta adanya catatan akuntansi yang akurat. Setiap pengajuan kredit harus selalu dievaluasi atau diperiksa kelayakan kreditnya. Bagian penjualan berbeda dengan bagian kredit. Persetujuan kredit hanya boleh dilakukan oleh manajer bagian kredit. Bila bagian penjualan sama dengan bagian kredit dikhawatirkan semua proposal kredit yang masuk akan disetujui tanpa adanya evaluasi berkaitan dengan komisi penjualan bila ditetapkan pada omset penjualan. Hal ini akan menyebabkan kemunculan resiko terutama terhadap calon pembeli yang memiliki citra kredit buruk.

Menurut Mulyadi (2018) Unsur pokok sistem pengendalian internal piutang adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
  - a. Fungsi piutang atas transaksi penjualan
    - 1) Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pencatatan keuangan, penagihan, dan pemberi layanan.
    - 2) Digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak (*prenumbered*),
  - b. Fungsi piutang atas penerimaan kas
    - 1) Diadakannya sub buku besar piutang atau kartu piutang (*accounts receivable subledger card*) untuk masing-masing pelanggan yang selalu diupdate (dimutakhirkan).
    - 2) Setiap akhir bulan dibuat *aging schedule* piutang (analisis umur piutang).

- 3) Setiap akhir bulan jumlah saldo piutang dari masing-masing pelanggan dibandingkan (*direconcile*) dengan jumlah saldo piutang menurut buku besar.
- 4) Setiap akhir bulan dikirim *monthly statement of account* kepada masing-masing pelanggan.
- 5) Uang kas, check atau giro yang diterima dari pelanggan harus disetor dalam jumlah seutuhnya (*intact*) paling lambat keesokan harinya.
- 6) Mutasi kredit diperkirakan piutang (buku besar dan sub buku besar) yang berasal dari retur penjualan dan penghapusan piutang harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang.
- 7) Setiap pinjaman yang diberikan kepada pegawai, direksi dan pemegang saham dan perusahaan afiliasi harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dijelaskan apakah dikenakan bunga atau tidak.

c. Fungsi penagihan

- 1) Penagihan piutang dilakukan oleh bagian penagihan harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan kas dan fungsi akuntansi.
- 2) Adanya surat pernyataan piutang secara periodik, hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada pelanggan akan kewajibannya.
- 3) Pelanggan ditagih dengan benar untuk semua komoditas yang dikeluarkan oleh departemen pengiriman.
- 4) Koleksi tagihan dapat dipertanggungjawabkan

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan formulir bernomor urut yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan.
  - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*), pemeriksaan mendadak dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan diperiksa. Dengan pemeriksaan mendadak maka akan mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kewajibannya.
  - c. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal hingga akhir oleh satu orang atau satu unit saja. Dengan begitu akan terjadi *internal check* terhadap pelaksanaan tugas dari masing-masing unit.
  - d. Perputaran jabatan dilakukan secara rutin hal ini bertujuan untuk menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
  - e. Keharusan pengambilan cuti. Selama cuti jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan,

diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.

- f. Secara periodic dilakukan pencocokan antara fisik dengan catatan, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi.
- g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur pengendalian. Untuk menjaga efektifitasnya unit ini tidak melakukan kegiatan operasional.

## **2.2 Piutang**

### **2.2.1 Pengertian piutang**

Piutang adalah transaksi yang terjadi akibat penjualan barang atau jasa oleh perusahaan. Piutang merupakan hak dari penjual atau penyedia jasa untuk menagih kepada konsumen atau pembeli dikarenakan adanya transaksi penjualan secara kredit (Solang, 2016).

Piutang (*Accounts receivable*) adalah jenis transaksi akuntansi yang berkecimpung dalam bidang penagihan konsumen, hal ini karena konsumen yang berhutang pada suatu perusahaan, seseorang, atau organisasi untuk pelayanan yang telah diterima oleh konsumen tersebut.

Piutang usaha merupakan piutang yang paling signifikan dari piutang itu sendiri, yang merupakan hasil dari aktivitas atau entitas perusahaan meliputi penjualan barang maupun jasa kepada konsumen secara kredit. Perjanjian tertulis secara formal untuk pembayaran piutang dapat memperkuat piutang usaha dan disebut wesel tagih (*Notes Received*). Piutang non usaha merupakan piutang yang timbul akibat kegiatan perusahaan selain penjualan barang dan

jasa kepada konsumen, yang termasuk piutang non usaha antara lain piutang penjualan saham, piutang bunga dan deviden, piutang kepada karyawan, piutang pajak.

### **2.2.2 Penilaian piutang usaha**

Semua piutang akan dilihat dan dinilai dari nilai terkini dari jumlah perhitungan penerimaan kas di masa mendatang. Piutang jangka pendek akan ditagih dalam kurun waktu 30-90 hari serta perhitungan bunga yang lebih sedikit dari piutangnya. Penggantian dari nilai piutang usaha pada nilai terkini yang didiskontokan, maka piutang akan dilaporkan menjadi net realize value atau nilai realisasi bersih atau nilai kas yang diinginkan. Dengan kata lain nilai piutang usaha harus dicatat sebesar jumlah bersih dari piutang tak tertagih dan potongan harga. Hal ini bertujuan untuk melaporkan piutang dengan jumlah klaim yang diperkirakan akan didapat secara tunai.

### **2.2.3 Analisis umur piutang**

Adanya resiko tak tertaginya piutang usaha membuat perusahaan melakukan penyisihan terhadap piutang tak tertagih. Penyisihan ini dapat didasarkan pada umur piutang atas jumlah yang telah ditetapkan. Namun dalam memilih dasar penyisihan perlu memperhatikan pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan dan menagih piutang.

Dalam Fitriana (2010) terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menganalisis umur piutang yaitu:

1. Accounts Receivable Turnover

*Accounts Receivable Turnover* yaitu angka yang menunjukkan berapa kali perusahaan melakukan penagihan piutang dalam satu periode. *Receivable Turnover* atau disebut juga perputaran piutang suatu perusahaan sangat penting untuk diketahui, dikarenakan semakin tinggi perputaran piutang suatu perusahaan maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan tersebut semakin banyak. Hal ini akan memperkecil piutang tak tertagih dan memperlancar arus kas. Perusahaan dapat mengetahui konversi piutang kedalam kas dalam periode tertentu menggunakan rasio ini. Rasio ini membandingkan total penjualan bersih secara kredit dengan rata-rata piutang usaha.

#### 2. *Number of days sales in receivable*

Rasio ini bertujuan untuk melakukan evaluasi tingkat efisiensi pelunasan piutang usaha. Rasio ini menggunakan perbandingan piutang usaha pada akhir periode dengan rata-rata penjualan kredit dengan 365 hari. *Number of days sales in receivable* harus kurang dari 20 hari.

#### 2.2.4 Penghapusan piutang

Penghapusan piutang adalah piutang yang tidak dapat ditagih lagi diantaranya dikarenakan debitur atau perusahaan yang bangkrut, pailit, meninggal maka harus dihilangkan sehingga akan berubah menjadi biaya perusahaan (Baridwan, 2014).

Reeves dalam Hartati (2010) mengungkapkan bahwa terdapat dua metode penghapusan piutang yang tidak tertagih, yaitu metode penyisihan (*allowance method*) dan metode penghapusan langsung (*direct write of method*).

##### a. Metode penghapusan langsung (*direct write of method*)

Biasa digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak bisa memprediksi kerugian karena piutang dengan baik. Pada akhir periode akuntansi kerugian piutang akan dicatat apabila sudah yakin bahwa piutang tidak bisa ditagih. Dengan begitu piutang tersebut akan dihapus dan dibebankan pada taksiran kerugian piutang dan mengkreditkan piutang.

Namun bila konsumen membayar piutang yang telah dihilangkan sebelum tutup buku maka, piutang yang telah dikreditkan didebetkan kembali dan beban pada kerugian piutang akan dikreditkan. Hal ini menyebabkan piutang usaha konsumen muncul lagi dan kembali dikreditkan pada saat melakukan pembayaran piutang.

Hal berbeda jika konsumen membayar piutang setelah tutup buku, maka perusahaan akan mendebetkan piutang konsumen dan akan mengkreditkan nilai piutang menjadi pendapatan lain-lain. Pada saat konsumen melakukan pembayaran piutang maka piutang dicatat diposisi debet.

b. Metode penyisihan (*Allowance Method*)

Biasa dilakukan oleh perusahaan berskala besar, yang mana perusahaan tersebut telah melakukan taksiran mengenai kerugian piutang usaha yang akan didapatkan karena adanya piutang tidak tertagih. Taksiran ini dibuat terkait piutang yang tidak tertagih dari seluruh penjualan kredit. Perkiraan ini ditulis sebagai beban dan pengurangan tidak langsung tidak langsung terhadap piutang usaha melalui peningkatan akun penyisihan dimana piutang tersebut ditulis. Metode penghapusan tidak langsung mencatat

beban atas dasar estimasi dalam periode akuntansi dimana penjualan kredit dilakukan.

Perusahaan akan menulis piutang tak tertagih pada posisi debet di cadangan piutang tak tertagih. Bila piutang tidak akan ditagih kembali maka perusahaan akan mencatat cadangan piutang pada posisi debet.

### **2.3 SOP Penyajian Laporan Piutang Rumah Sakit**

Penyajian laporan piutang pada rumah sakit bertujuan untuk mengetahui keseluruhan *account receivable* dan *account payable*. Setiap instansi memiliki SOP pengakuan piutang yang berbeda. Unit terkait dengan penyajian laporan piutang di Rumah Sakit Advent antara lain Departemen PBO, *Accounting*, kasir terima, kasir bayar. Di Rumah Sakit Advent Sumatera Utara prosedur dalam penyajian laporan piutang dilakukan ketika semua pemostingn sudah selesai. Setelah itu prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menarik financial statement
- 2) Memeriksa saldo setiap A/R
- 3) Melakukan koreksi jurnal apabila dibutuhkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kabid keuangan
- 4) Setelah selesai mengoreksi jurnal tarik kembali laporan keuangan
- 5) Sajikan laporan account receivable secara general total *per account code*
- 6) Laporan diserahkan kepada bendahara.

### **2.4 Penelitian terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat menjadi suatu acuan bagi peneliti atau penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori



untuk mengkaji dalam penelitian yang akan dilakukan. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil	Sumber
1	Nurfatin Fiqgiya, Irwansyah, Indra Sunyoto Kurniawan	Analisis sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada rumah sakit umum daerah	Analisis deskriptif kualitatif	beberapa sistem dan prosedur pada penerimaan kas pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara belum sepenuhnya sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang seharusnya karena terdapat perangkapan tugas pada fungsi penerimaan kas	Jurnal Akuntabel 17 (1) 2020 80-86.
2	Rigel nurul fatah	Analisis sistem pengendalian internal pada rumah sakit PKU muhammadiyah nanggulan	Analisis deskriptif kualitatif	Sistem analisis pengendalian di RS PKU Muhammadiyah Nanggulan masih lemah. Hal ini Nampak pada komponen lingkungan pengendalian yang tidak ada struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas di setiap bagian. Belum ada pembagian tugas dan tanggungjawab.	Jurnal Muara Ilmu ekonomi dan bisnis Vol 3 No 1 2019. ISSN 2579-6224.
3	Rendy Fadhlhan Putra	Analisis Manajemen piutang pendapatan jasa layanan pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Tahap tahap manajemen piutang dalam siklus piutang sudah menunjukkan bahwa Rumah Sakit sudah melakukan manajemen piutang dengan baik, tetapi masih ada beberapa masalah di dalam rumah sakit yaitu, Rumah Sakit tidak membedakan tariff untuk pasien umum dan pasien BPJS sedangkan tarif Rumah Sakit dengan BPJS	Jurnal EMBA Vol 4 No 3 tahun 2016. ISSN 2303-1174

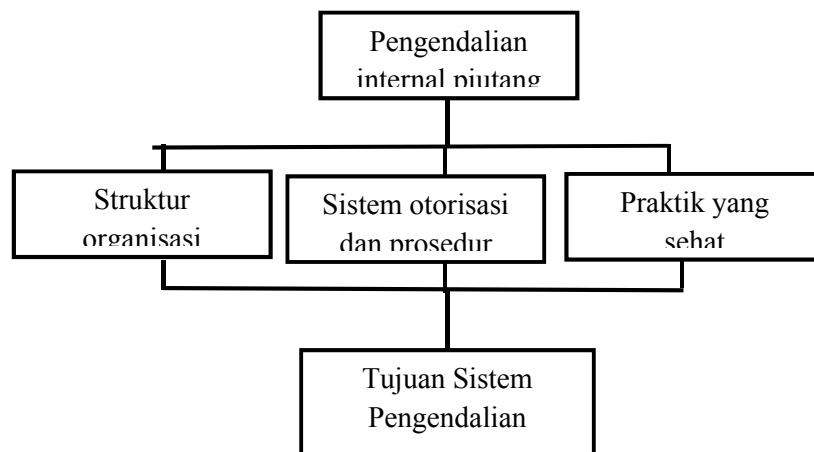
				tidak sama sehinggamenyebabkan Rumah Sakit dapat mengalami keuntungan/kerugian	
4	Nurul Azizah	Analisis pengendalian internal terhadap piutang umum (Studi Kasus pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang).	Metode analisis deskriptif kualitatif	pengendalian internal pada pengelolaan piutang umumRSUD Dr. Saiful Anwar masih kurang efektif.	Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
5	Nurzulaikha Permata Lendrani	Evaluasi sistem pengendalian interna piutang usaha pada rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Secara umum pengendalian piutang RS Daerah Idaman Banjarbaru masih kurang efektif	Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lmabung Mangkurat.

## 2.5 Kerangka berfikir

Rumah Sakit Advent Provinsi Sumatera Utara adalah rumah sakit umum yang memiliki reputasi baik. Tidak hanya melayani kesehatan dasar namun RS Advent Provinsi Sumatera Utara juga memiliki beberapa poliklinik spesialis yang menunjang pelayanannya. Dalam pemberian pelayanan pada konsumen dalam hal ini pasien, RS Advent Provinsi Sumatera Utara memberikan kemudahan pembayaran melalui piutang dengan pihak ketiga sebagai pemberi layanan pembayaran. Terdapat beberapa institusi atau perusahaan asuransi yang menjalin kerjasamadengan RS Advent Provinsi Sumatera Utara antara lain PT. AA International, ABDA, asuransi Adira Dinamika, AIA, PT.

Ajinomoto, ALLIANZ, Astra Life, BRI Life Admedika, Central Asia Raya dan masih banyak lagi.

Kerjasama ini terkait piutang pelayanan dengan RS Advent Provinsi Sumatera Utara. Agar piutang tersebut berjalan lancar maka perlu dilakukan penagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui dan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan piutang usaha agar berjalan dengan baik melalui pengendalian internal yang mengacu pada unsur-unsur pengendalian internal yaitu meliputi struktur organisasi dan praktik yang sehat yang telah dijelaskan sebelumnya. Gambar dibawah ini menggambarkan kerangka berfikir penelitian:



Gambar 2.1 kerangka berfikir penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan data yang lebih mendalam sebab suatu data mengandung makna-makna tertentu. Makna inilah yang merupakan data yang sebenarnya. Sehingga dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi namun lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga bisa sampai pada tingkat makna dari data itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis pengendalian internal piutang menggunakan landasan teori dari Mulyadi yang mengungkapkan bahwa unsur-unsur pengendalian internal piutang yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tegas dan praktik yang sehat guna mencegah kecurangan.

#### **3.2 Tempat dan waktu penelitian**

##### **3.2.1 Tempat penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di RS Advent Provinsi Sumatera Utara, merupakan badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan primer dan lanjutan.

##### **3.2.2 Waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023.

### **3.3 Sumber data**

Sumber data adalah dari mana data tersebut didapatkan oleh peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **3.3.1 Data primer**

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang didapatkan langsung dari rumah sakit melalui wawancara langsung dengan staf atau karyawan rumah sakit bagian akuntansi dan keuangan (responden) terkait data persentase cadangan kerugian piutang, jenis-jenis piutang di Rumah sakit Advent Provinsi Sumatera Utara, lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

#### **3.3.2 Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari catatan dan dokumen yang telah diolah. Dengan kata lain data sekunder berasal dari sumber yang telah terdokumentasikan oleh rumah sakit. Data sekunder ini meliputi data, sejarah singkat RS Advent Provinsi Sumatera Utara, struktur organisasi rumah sakit, SOP Accounting dan finance serta data piutang tak tertagih RS Advent Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

### **3.4 Pengumpulan data**

Terkait dengan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

#### **3.4.1 Teknik wawancara**

Peneliti melakukan wawancara terhadap responden yang merupakan staff RS Advent Provinsi Sumatera Utara bagian akuntansi dan keuangan.

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara Tanya jawab menggunakan alat yang bernama *interview guide*. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan atau lokasi penelitian maka penelitian dimulai dengan melakukan wawancara dengan informan kunci kemudian mencatat hasil wawancara tersebut.

#### 3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan semua bahan yang telah tertulis atau pengumpulan bahan kepustakaan bisa juga juga disebut studi dokumen yang merupakan pelengkap dari metode wawancara. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat mengenai objek penelitian tersebut. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang piutang usaha.

### 3.5 Metode analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode analisis dengan awalan mengumpulkan data kemudian diklarifikasi, dianalisis lalu diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai hal yang diteliti. Teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan.

Unsur pengendalian internal piutang dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori dari Mulyadi (2018) yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas
2. Praktik yang sehat guna menghindari kecurangan

Selain itu peneliti juga menganalisis tentang piutang tak tertagih dan prosedur piutang. Adapun metode deskriptif yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:

#### 3.5.1 Penyajian data

Setelah data direduksi, kemudian data disajikan. Penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 3.5.2 Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik dari hasil penyajian data hasil penelitian. Penarikan kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

